

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia Merupakan Negara Kepulauan yang sangat luas dan mempunyai jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota otonom. Secara teknis, kabupaten dan kota mempunyai level yang sama dalam pemerintahan. Pembagian tersebut berdasarkan atas apakah administrasi pemerintahan berlokasi di wilayah pedesaan atau di wilayah perkotaan. Di dalam kabupaten dan kota terdapat kecamatan yang merupakan unit pemerintahan administrasi yang lebih kecil. Setiap kecamatan dibagi menjadi desa. Desa di wilayah pedesaan disebut desa, sedangkan wilayah perkotaan disebut kelurahan (Kuncoro, 2014: 28). Sebagai sebuah Negara kepulauan yang sangat besar, Indonesia memerlukan sebuah strategi pembangunan nasional dan regional yang sesuai dengan karakter dan keunggulan masing-masing wilayah.

Konsep pembangunan desentralisasi adalah konsep pembangunan yang cocok untuk dikembangkan di Indonesia saat ini melalui otonomi daerah. Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan yang terdesentralisasi ini, maka pelaksanaan pembangunan disetiap daerah otonomi perlu dipersiapkan dengan penyusunan konsep pembangunan yang lebih matang yang sesuai dengan potensi, kendala dan kesempatan yang dimiliki oleh setiap daerah otonom tersebut. Maka dari itu setiap daerah akan memiliki prinsip yang berbeda dalam mengimplementasikan konsep dan strategi pembangunannya. Pada akhirnya pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah akan bersifat spesifik dan diharapkan unggul secara kompetitif (unggul dalam harga) maupun komparatif (unggul dalam sumberdaya) di bidang-bidang perekonomian tertentu (Adisasmita, 2011: 32).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi tersebut, beberapa peraturan Pemerintah sudah pula dikeluarkan. Sejak saat itu, pemerintah dan pembangunan daerah di seluruh Nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Sjafrizal, 2014: 14).

Dengan adanya otonomi daerah menimbulkan perubahan yang cukup mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan yang selama ini cenderung seragam, kemudian mulai berubah dan cenderung bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan dan disesuaikan dengan keinginan aspirasi yang berkembang di daerah.

Menurut Sjafrizal (2014: 14) Perubahan yang terjadi dengan adanya otonomi daerah pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yaitu: pertama, pemerintah daerah diberikan wewenang lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan). Kedua, pemerintah daerah diberikan sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal). Kesemuanya ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih diperdayakan dan dapat melakukan kreasi dan terobosan baru dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerah masing-masing sesuai potensi dan aspirasi masyarakat daerah bersangkutan. Hal ini berarti daerah harus lebih mampu menetapkan skala prioritas yang tepat untuk memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing.

Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang lahir dari sebuah proses perjalanan panjang dari aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang. Wilayah Kabupaten Balangan dewasa ini tengah berubah dan berkembang cukup pesat. Perubahan yang terjadi antara lain terlihat di sepanjang kawasan jalur lintas Kalimantan Selatan, termasuk di Kota Paringin, yang di tandai antara lain oleh

terjadinya pertumbuhan penduduk dan kawasan terbangun yang relatif tinggi di wilayah ini jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Apabila mencermati data kependudukan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, jumlah penduduk kabupaten Balangan bertambah dari 117.088 jiwa (2012) menjadi 119.171 jiwa (2013) atau meningkat sebesar 2 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2012 - 2013

N0	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2012	117.088
2	2013	119.171

Sumber: BPS Kabupaten Balangan 2014

Sedangkan perubahan fungsi lahan seiring dengan perubahan/perpindahan pemukiman penduduk dari luar daerah (migrasi) ke Kabupaten Balangan maupun dalam lingkungan daerah itu sendiri, banyak di temukan pada beberapa kawasan disepanjang sisi kanan dan kiri jalur lintas Kalimantan Selatan dengan bermunculannya kawasan-kawasan pemukiman baru, baik yang di bangun melalui pengembang berupa komplek perumahan, maupun berupa deretan bangunan tempat tinggal atau ruko (rumah toko) baru milik penduduk yang di bangun secara perorangan. Perkembangan fisik kawasan dan penambahan penduduk ini akan berdampak pada kebutuhan ruang dan aktifitas kebutuhan lainnya di wilayah kabupaten Balangan. Hal ini menunjukkan cukup pesatnya pertumbuhan dan perkembangan wilayah di Kabupaten Balangan.

Berdasarkan kecenderungan perkembangan terakhir, maka Kabupaten Balangan di masa akan datang berpeluang untuk terus berkembang dan lebih maju apabila semua potensi wilayah yang di miliki kabupaten Balangan dapat di mamfaatkan secara optimal untuk membangun wilayah, antara lain seperti potensi sumber daya alam yang cukup besar. Diantara potensi yang menonjol di Kabupaten Balangan disamping sejumlah lahan pertanian dan industri pengolahan gula merah, adanya deposit pertambangan batu bara dan penggalian, ada beberapa lokasi di Kabupaten Balangan.

Jika dilihat dari keberadaan keberadaan dan kelengkapan sarana prasarana pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan termasuk memadai, tetapi akses masyarakat terhadap sarana prasarana tersebut masih sangat terbatas, terutama untuk masyarakat pedesaan. Ini disebabkan karena sebagian besar sarana prasarana tersebut masih terakumulasi di daerah-daerah perkotaan yakni Kota Paringin sebagai pusat pemerintahan, sehingga daerah sentra produksi pertanian yang umumnya berada di pedesaan cenderung mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan dari fasilitas-fasilitas tersebut, karena interaksinya sangat terbatas ke pusat-pusat pelayanan tersebut. Hal ini kemudian berdampak pada terjadinya kesenjangan antar daerah perkotaan dan pedesaan sebagai daerah belakangnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menganalisis potensi wilayah Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam usulan penelitian yang berjudul **“ANALISIS POTENSI WILAYAH SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN DAN PELAYANAN DI KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang coba diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Kecamatan manakah yang paling optimal sebagai pusat pertumbuhan yang mampu menggerakkan kawasan sekitarnya di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Kecamatan manakah yang paling optimal sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji kecamatan yang paling optimal sebagai pusat pertumbuhan yang mampu menggerakkan kawasan sekitarnya di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Mengkaji kecamatan yang paling optimal sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kebijakan pembangunan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1. Telaah Pustaka

1.5.1.1. Geografi

Geografi adalah ilmu yang mempelajari timbal balik antara bumi dan manusia. Bumi dan manusia di situ dapat di tafsirkan sebagai alam dan manusia, atau lingkungan alam dan penduduk. Manusia di situ bukanlah manusia sebagai individu melainkan sebagai kelompok, karena adaptasinya terhadap lingkungan alamnya di laksanakan secara kolektif. Misalnya sebagai penghuni desa, penduduk wilayah, sebagai bangsa (Djaljoeni, 1997: 12).

Menurut Djaljoeni (1997: 2) geografi menelaah bumi dalam hubungannya dengan manusia. Arti geografi sebenarnya adalah uraian (*grafein* artinya menguraikan atau melukiskan) tentang bumi (*geos*) dengan segenap isinya, yakni manusia, yang kemudian di tambah lagi dengan dunia hewan dan dunia tumbuhan. Tentu saja geografi membutuhkan berbagai hasil telaah geologi, misalnya untuk membicarakan vulkanisme, gempa bumi, pertambangan, dan jenis batuan. Pembicaraan tersebut dimasukkan dalam pembelajaran geografi fisis yang

pemberiannya di sekolah dimaksudkan untuk mendasari pengajaran geografi sosial.

Lebih lanjut di katakan berhubung kehidupan manusia, hewan dan tetumbuhan itu bertempat di bagian permukaan kulit bumi yang merupakan daratan dan lautan di tambah lagi udara di atasnya, maka pokok-pokok yang di bahas dalam geografi fisis terdiri atas lithosfera, hidrosfera, dan atmosfera. Dengan urutan-urutan itu lalu di perkenalkan aneka hasil telaah geologi, geomorfologi, oseanografi, meteorologi, dan klimatologi.

Dari penjelasan di atas, dengan sederhana dapatlah di katakan bahwa geografi merupakan suatu ilmu yang dapat di pelajari seluk-beluk permukaan bumi serta hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya.

Menurut H.S.Yunus (2010: 41) dalam ilmu geografi terdapat 3 pendekatan utama yaitu pendekatan keruangan (*spatial approach*), pendekatan ekologi (*ecological approach*), dan pendekatan regional (*region complex approach*). Lebih lanjut, ketiga pendekatan tersebut dianggap sebagai pendekatan utama geografi yang tidak muncul secara instan, namun melalui proses perkembangan ilmu pengetahuan geografi itu sendiri yang terjadi dalam waktu yang lama. Menurut Berdasarkan perkembangan paradigma keilmuan geografi, di kenal ada 4 macam paradigma dengan karakteristik masing-masing dan hal inilah yang mendasari karakteristik pendekatan geografi, keempat paradigma keilmuan keilmuan geografi tersebut adalah:

1. Paradigma eksplorasi (*exploration paradigm*)
2. Paradigma lingkungan (*environmentalism paradigm*)
3. Paradigma kewilayahan (*regionalism paradigm*)
4. Paradigma keruangan (*spatial paradigm*)

Keempat jenis paradigma keilmuan geografi tersebut mempunyai cirri-ciri yang berbeda satu sama lain dan hal inilah yang kemudian mendasari kemunculan pendekatan-pendekatan geografi yang di kenal saat ini (Tabel 1.1)

Tabel 1.2 Keterkaitan Paradigma Keilmuan Geografi dengan Pendekatannya

Paradigm	Karakteristik	Pendekatannya
Paradigm Eksplorasi (<i>Exploration Paradigm</i>)	Pemetaan dan penggambaran daerah baru yang memotivasi penelitian dan menghasilkan tulisan-tulisan sederhana tentang daerah baru	Belum mempunyai ciri khusus karena belum dianggap belum berupa metode ilmiah
Paradigma Environmetalisme (<i>Environmentalism Paradigm</i>)	Analisis yang lebih sistematis tentang peranan elemen lingkungan terhadap pola kegiatan manusia. Analisis morfometrik dan kausalitas mendominasi dan di fokuskan hanya pada wilayah tertentu.	<i>Ecological Approach</i>
Paradigm regionalisme (<i>Regionalism Paradigm</i>)	Analisis lebih mendalam dan lebih luas dengan membandingkan wilayah satu dengan lainnya dalam penekanan pada keterkaitan antara elemen lingkungan dengan kegiatan manusianya	<i>Regional Complex Approach</i>
Paradigm Analisis Spasial (<i>spatial Analysis Paradigm</i>)	Analisis pada ruang yang lebih khusus di mna <i>space</i> dianggap sebagai variable utama di samping variable lain yang banyak dilibatkan. Teknik-teknik analisis kuantitatif mendominasi pada awalnya dan kemudian terjadi penggabungan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif.	<i>Spatial Approach</i>

Sumber: Herbert & Thomas, 1982; Johnston, *et al.*, 2000 dalam H.S. Yunus (2010: 42)

1.5.1.2. Konsep Wilayah Dalam Pembangunan

Wilayah/*region* dapat diartikan sebagai permukaan yang luas, yang di huni manusia yang melakukan interaksi kegiatan dengan sumberdaya alam, sumberdaya modal, sumberdaya teknologi, sumberdaya kelembagaan, dan sumberdaya pembangunan lainnya, untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat (Adisasmita, 2011: 59). Menurut H.S. Yunus (2010: 124) dalam pengertian wilayah/*region* didalamnya mengandung beberapa esensi yaitu:

1. Suatu wilayah mempunyai batas-batas tertentu yang dapat digunakan untuk mengenali karakteristiknya sehingga dapat dibedakan dengan wilayah tetangganya/wilayah lainnya.
2. Suatu wilayah mempunyai karakteristik tertentu yang mengindikasikan kesatuan internalnya.
3. Karakteristik mana menunjukkan keseragaman yang dapat di amati dalam lingkup satuan daerah di mana atribut tersebut berada.
4. Karakteristik wilayah dapat merupakan fenomena alami seperti wilayah tanah, wilayah geomorfologi, wilayah hidrologi dan wilayah lain sejenisnya. Karakteristik wilayah yang mendasarkan pada fenomena non alami atau artifisial misalnya wilayah budaya, wilayah industri, wilayah ekonomi, dan lain sejenisnya.
5. Suatu wilayah tidak ditentukan oleh luas atau tidaknya wilayah mulai beberapa meter persegi saja sampai wilayah benua.
6. Suatu wilayah mempunyai batas-batas yang dapat berubah oleh karena sebab-sebab tertentu, seperti pengubahan batas administrasi, batas wilayah yang berubah karena perkembangan kota.
7. Suatu wilayah dapat mempunyai batas-batas fisik yang jelas seperti sungai, jalan, tepi danau, tepi laut, batas tipe penggunaan lahan, namun dapat pula mempunyai batas maya yang tidak dapat dilihat di lapangan seperti batas administrasi, batas wilayah etnik, batas wilayah budaya, wilayah bahasa dan sejenisnya. Untuk maksud penelitian pada suatu wilayah yang mempunyai batas-batas yang bersifat maya, perlu di buat batas konseptual atas pertimbangan tertentu dan untuk menelitinya

peneliti harus mampu menentukan lokasi sampel yang benar-benar mewakili sifat khas/karakteristik wilayahnya. Hal ini akan dibahas dalam hal regionalisasi/pewilayahan.

Menurut P. Hdjisarosa, 1980 dalam Adisasmita (2011: 60) konsep wilayah dapat dibedakan ke dalam: (1) wilayah administrasi dan (2) wilayah pengembangan. Wilayah administrasi adalah wilayah yang mempunyai batas wilayah pemerintahan daerah, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah/peraturan daerah, yang dikelompokkan dalam wilayah provinsi, wilayah kabupaten dan wilayah kota, yang masing-masing memiliki ibukota pemerintahan, di mana kedudukan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR). Sedangkan, wilayah pengembangan adalah wilayah, yang luasan wilayahnya tidak ditetapkan berdasarkan batas wilayah administrasi, atau tidak menggunakan batas wilayah administrasi, tetapi batas-batasnya adalah secara fungsional, berdasarkan kegiatan interaksi sumberdaya manusia (penduduk), sumberdaya Alam, sumberdaya modal, sumberdaya teknologi, sumberdaya kelembagaan, dan sumberdaya pembangunan lainnya.

Dengan demikian luasan wilayah pengembangan tidak terlalu sama besar dengan wilayah administrasi, mungkin lebih kecil karena sebagian wilayahnya merupakan pegunungan yang tinggi atau jurang yang dalam, sehingga tidak dihuni oleh penduduk dan tidak terjangkau oleh pelayanan jasa distribusi karena belum tersedia fasilitas transportasi.

1.5.1.3. Konsep Pertumbuhan Wilayah

Teori kutub pertumbuhan (*growth pole theory*) diintroduksikan oleh Francois Perroux (1956). Menurut pendapatnya, pertumbuhan atau pembangunan tidak dilakukan di seluruh tata ruang, tetapi terbatas pada beberapa tempat atau lokasi tertentu. Tata ruang diidentifikasi sebagai kutub-kutub atau pusat-pusat, di setiap kutub mempunyai kekuatan pancaran pengembangan ke luar dan kekuatan tarikan ke dalam. Teori ini menjelaskan tentang pertumbuhan perusahaan dan industri-industri serta ketergantungannya, dan bukan mengenai pola geografis dan pergeseran industri baik secara intra maupun secara inter. Pada

dasarnya konsep kutub pertumbuhan mempunyai pengertian tata ruang ekonomi secara abstrak.

Menurut R. Adisasmita (2006: 163), suatu tempat merupakan suatu kutub pertumbuhan apabila di tempat tersebut terdapat industri pendorong (*propulsive industry*) yang berskala besar, mempunyai kemampuan menciptakan dorongan pertumbuhan yang kuat, dampak multiplier dan dampak polarisasi lokal yang sangat besar dan tingkat teknologi yang maju. Lebih lanjut kutub pertumbuhan bukan hanya merupakan lokalisasi industri kunci semata-mata, tetapi pertumbuhan harus juga mendorong ekspansi yang luas ke daerah sekitarnya.

Konsep kutub pertumbuhan merupakan konsep sangat menarik bagi perencanaan wilayah. Persoalan yang di hadapi dalam penerapan konsep tersebut adalah pemilihan industri pendorong ataupun industri yang menonjol (*leading industry*) sebagai penggerak dinamika pertumbuhan.

Menurut R. Adisasmita (2006: 164) kutub pertumbuhan dapat ditafsirkan dalam dua pengertian, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, menggambarkan kutub pertumbuhan sebagai suatu kelompok perusahaan, industri atau unsure-unsur dinamik yang meningkatkan kehidupan ekonomi. Secara geografis. Menunjukkan kutub pertumbuhan sesungguhnya lebih banyak merupakan daya tarik yang mengundang berbagai kegiatan untuk menempatkan usahanya di suatu tempat.

Lebih lanjut dikatakan bahwa terdapat tiga ciri penting konsep kutub pertumbuhan dapat dikemukakan yaitu:

1. Terdapat keterkaitan internal berbagai industri secara teknik dan ekonomi.
2. Terdapat pengaruh multiplier.
3. Terdapat konsentrasi geografis

Mengikuti pendapat Perroux, Boudeville mendefinisikan kutub pertumbuhan wilayah sebagai perangkat industri sedang berkembang yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan lebih lanjut pengembangan ekonomi melalui wilayah pengaruhnya (*localized poles of development*). Ia menekankan pada aspek fungsional, tetapi juga pada aspek geografis yang dilukiskan sebagai suatu aglomerasi geografis. Teori Bondeville

dapat di anggap telah menjembatani terhadap teori spasial terdahulu (Christaller) dan teori kutub pertumbuhan (Perroux). Perbedaannya, teori Perroux menganggap tata ruang secara abstrak yang menekankan cirri-ciri regional tata ruang ekonomi, sedangkan menurut Bondeville tata ruang ekonomi tidak dapat di pisahkan dari tata ruang geografis, lebih lanjut Bondeville menekankan pada tata ruang polarisasi (R. Adisasmita, 2006: 165).

1.5.1.4. Prasarana Sebagai Penunjang Pembangunan

Ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi turut berpengaruh terhadap kemajuan suatu wilayah. Evaluasi fasilitas terhadap fasilitas herarki pelayanan merupakan bagian dari analisis regional, khususnya yang menyangkut tentang sentralisasi regional. Metode pengukuran fasilitas pelayanan sosial ekonomi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori (Muta'ali, 2000, dalam Haryanto, A.T, 2006).

1. Ketersediaan pelayanan (*service availability*) adalah mengukur ada atau tidaknya suatu fasilitas pelayanan
2. Tingkat pelayanan (*size of availability*) adalah mengukur suatu jumlah fasilitas pelayanan.
3. Fungsi ketersediaan adalah perbandingan antara ketersediaan fasilitas pelayanan dengan variable perbandingan standar.

Huisman (1989) mengungkapkan bahwa pelayanan merupakan salah satu kebijakan pembangunan keruangan untuk meningkatkan pertumbuhan pusat-pusat pelayanan yang dapat menghubungkan pusat kota dengan daerah *hinterlandnya*. Dalam rangka meningkatkan perkembangan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi, fasilitas pelayanan merupakan hal yang sangat penting. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar apabila prasarana kurang memadai. Dengan demikian prasarana dianggap sebagai faktor yang potensial dalam menentukan masa depan perkembangan suatu wilayah perkotaan dan pedesaan.

Jayadinata (1986) mengklasifikasikan prasarana sebagai berikut :

1. Prasarana menurut bentuk, macam dan fungsinya.
 - a. Bentuk prasarana

- i. Prasarana yang berbentuk ruang atau bangunan (*space*)
 - ii. Prasarana yang berbentuk jaringan (*network*)
 - b. Macam prasarana
 - i. Prasarana berbentuk ruang meliputi :
 - Perlindungan, yaitu rumah, Pelayanan umum (sosial), misalnya rumah sakit, perumahan, dan sebagainya.
 - Kehidupan ekonomi, misalnya bank, toko, sawah, pasar dan sebagainya.
 - Kebudayaan, misalnya bangunan pemerintah, sekolah, museum, lapangan olahraga, dan sebagainya.
 - ii. Prasarana berbentuk jaringan, meliputi :
 - Sistem pengangkutan, misalnya jaringan jalan, jaringan sungai dan sebagainya.
 - Utilitas umum (*publi utility*), misalnya jaringan pipa air minum, jaringan kawat listrik, dan sebagainya.
 - Sistem komunikasi, misalnya jaringan kabel telpon, dan sebagainya.
 - c. Prasarana menurut fungsi, meliputi :
 - i. Prasarana sosial (yang berbentuk jaringan atau ruuang) terdapat dalam kegiatan kekeluargaan, pemerintahan, agama, kesehatan, pendidikan, perhubungan, komunikasi serta informasi.
 - ii. Prasarana ekonomi (yang berbentuk jaringan atau ruang) terdapat dalam kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, industri, pariwisata, perhotelan, bank, perdagangan dan perusahaan jasa serta informasi data.
2. Pembiayaan dan pembuatan serta pemeliharaan prasarana.
- a. pembiayaan, pertumbuhan dan pemeliharaan prasarana meliputi :
 - i. Masyarakat
 - ii. Badan Hukum
 - iii. Pemerintah
 - b. Cara pembuatan prasarana

- i. Teknologi sederhana
- ii. Teknologi madya
- iii. Teknologi tinggi

Menurut Huisman (1989) penyediaan pelayanan secara efisiensi dan efektif dalam pembangunan karena dalam perencanaan fisik memberikan kerangka keruangan kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan demikian pelayanan sosial ekonomi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada kegiatan sosial ekonomi.

Adapun metode yang dapat digunakan untuk ,menilai tingkat ketersediaan dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Besarnya ketersediaan fasilitas pelayanan dinilai melalui jumlah pelayanan yang ada di setiap daerah, menggunakan metode skalogram.
2. Fungsi pelayanan merupakan perbandingan antara ketersediaan fasilitas dengan berbagai standar minimum untuk setiap pelayanan. Informasi-informasi lain yang diperlukan pada penilaian fungsi pelayanan antara lain mencakup rasio pelayanan terhadap standar, rasio terhadap pengguna aktual, rasio terhadap pengguna potensial, dan rasio terhadap penduduk.

1.5.2. Penelitian Sebelumnya

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan pembentukan daerah otonom, diantaranya sebagai berikut:

Sri Purwaningsih (2014) “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2007-2011” yang mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2007-2011 dan menganalisa tentang pertumbuhan ekonomi di Wonogiri. Dalam penelitian ini terdapat tiga tujuan dilakukan penelitian yaitu: (1) mengetahui pertumbuhan antarkecamatan yang di klasifikasikan menjadi hierarki tinggi, sedang, rendah, (2) mengetahui struktur ruang wilayah berdasarkan system pusat kegiatan perkotaan dengan hierarki pertumbuhan ekonomi wilayah kecamatan, dan (3) mengetahui sektor apa yang

menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Wonogiri. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder. Analisis data tersebut menggunakan metode Sturgess, uji Chi square, dan metode Location Quotient. Hasil penelitian yaitu hierarki tinggi terdapat pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Baturetno, dan hierarki sedang terdapat pada Kecamatan Pracimantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kecamatan Wuryantoro, Kecamatan Selogiri, Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Purwantoro, Kecamatan Bulokerto, Kecamatan Slogohimo, dan Kecamatan Jatisrono. Sedangkan hierarki rendah terdapat di kecamatan Paranggupito, Kecamatan Giritontro, Kecamatan Giriwoyo, Kecamatan Batuwarno, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Nguntorongadi, Kecamatan Eromoko, kecamatan Manyaran, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan kismantoro, Kecamatan Pehpelem, Kecamatan Jatipurno, dan Kecamatan Girimarto. Hasil penentuan hierarki menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri karena jumlah kecamatan yang termasuk hierarki rendah jumlahnya paling banyak. Tingkat hierarki pertumbuhan ekonomi wilayah antarkecamatan tidak memiliki ruang struktur wilayah berdasarkan system pusat kegiatan perkotaan artinya semakin tinggi derajat perkotaan suatu kecamatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan wilayah ekonomi yang tinggi terbentuk oleh sektor unggulan yaitu sektor pertanian.

Imam Zunaidi (2007) “Peranan Pusat Pertumbuhan Dan Kesenjangan Pendapatan Antar Wilayah di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VII Propinsi Jawa Timur Tahun 2000-2005”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan pusat pertumbuhan dalam memberikan spread effect melalui kekuatan daya tariknya bagi wilayah hinterland, pergeseran total pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan kesenjangan pendapatan antar wilayah pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Alat analisis yang digunakan untuk mengolah data adalah analisis Indeks Gravitasi untuk mengetahui daya tarik pusat pertumbuhan dengan hinterland, analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui kontribusi pertumbuhan ekonomi dan analisis Indeks Williamson untuk mengetahui kesenjangan pendapatan. Data yang digunakan merupakan data

sekunder yang dikutip dari kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan studi literatur. Hasil analisis Indeks Gravitasi menunjukkan nilai diatas enam digit yaitu 266.533.959,60 sampai dengan 2.369.861.018,67, hal ini menunjukkan bahwa sarana-sarana yang tersedia di pusat pertumbuhan digunakan oleh daerah hinterland dan besar pula fungsi pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya. Hasil analisis dengan menggunakan analisis Shift Share menunjukkan daerah yang termasuk pergeseran pertumbuhan ekonominya maju adalah Kota/Kabupaten Kediri 0,71% (maju), Kota/Kabupaten Blitar 87,56% (maju), Kabupaten Nganjuk 12,25% (maju), Kabupaten Tulungagung 0,39% (maju) dan Kabupaten Trenggalek 12,32% (maju), sedangkan Kabupaten Jombang sebesar -25,15% (lambat). Hasil analisis Indeks Williamson menunjukkan angka kurang mendekati satu yaitu 0,41 sampai dengan 0,62, yang berarti kesenjangan pendapatan antara pusat pertumbuhan dengan hinterland relatif kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2. dibawah ini.

Tabel 1.3. Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian Sebelumnya

Peneliti/Tahun	Sri Purwaningsih (2014)	Imam Zunaidi (2007)	Akhmad Saputra Hermawan (2014)
Judul	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2007-2011	Peranan Pusat Pertumbuhan Dan Kesenjangan Pendapatan Antar Wilayah di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VII Propinsi Jawa Timur Tahun 2000-2005	Analisis Potensi Wilayah Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Tujuan	mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2007-2011 dan menganalisa tentang pertumbuhan ekonomi di Wonogiri	untuk mengetahui seberapa besar peranan pusat pertumbuhan dalam memberikan spread effect melalui kekuatan daya tariknya bagi wilayah hinterland, pergeseran total pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan kesenjangan pendapatan antar wilayah pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005	(1) mengetahui kecamatan yang paling optimal sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. (2) mengetahui Kecamatan yang paling optimal sebagai pusat pertumbuhan yang mampu menggerakkan kawasan sekitarnya di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
Unit Penelitian	Wilayah	Wilayah	Wilayah

Metode dan Analisis Variabel	metode Sturges, uji Chi square, dan metode Location Quotient.	Analisis Indeks Gravitasi untuk mengetahui daya tarik pusat pertumbuhan dengan hinterland, analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui kontribusi pertumbuhan ekonomi dan analisis Indeks Williamson untuk mengetahui kesenjangan pendapatan	Analisis Gravitasi dan Skalogram untuk menentukan kecamatan yang paling optimal sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dalam kerangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Balamgn Provinsi Kalimantan Selatan
Hasil	Hierarki tinggi terdapat pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Baturetno, dan hierarki sedang terdapat pada Kecamatan Pracimantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kecamatan Wuryantoro, Kecamatan Selogiri, Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Purwantoro, Kecamatan Bulokerto, Kecamatan Slogohimo, dan Kecamatan Jatisrono. Sedangkan hierarki rendah terdapat di kecamatan Paranggupito, Kecamatan Giritontro, Kecamatan Giriwoyo, Kecamatan Batuwarno, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Nguntorongadi, Kecamatan Eromoko, kecamatan Manyaran, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan kismantoro, Kecamatan Pehpelem, Kecamatan Jatipurno, dan Kecamatan Girimarto.	Hasil analisis Indeks Gravitasi menunjukkan nilai diatas enam digit yaitu 266.533.959,60 sampai dengan 2.369.861.018,67, hal ini menunjukkan bahwa sarana-sarana yang tersedia di pusat pertumbuhan digunakan oleh daerah hinterland dan besar pula fungsi pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya. Hasil analisis dengan menggunakan analisis Shift Share menunjukkan daerah yang termasuk pergeseran pertumbuhannya maju adalah Kota/Kabupaten Kediri 0,71% (maju), Kota/Kabupaten Blitar 87,56% (maju), Kabupaten Nganjuk 12,25% (maju), Kabupaten Tulungagung 0,39% (maju) dan Kabupaten Trenggalek 12,32% (maju), sedangkan Kabupaten Jombang sebesar -25,15% (lambat). Hasil analisis Indeks Williamson menunjukkan angka kurang mendekati satu yaitu 0,41 sampai dengan 0,62, yang berarti kesenjangan pendapatan antara pusat pertumbuhan dengan hinterland relatif kecil	

Sumber: Penulis, 2015

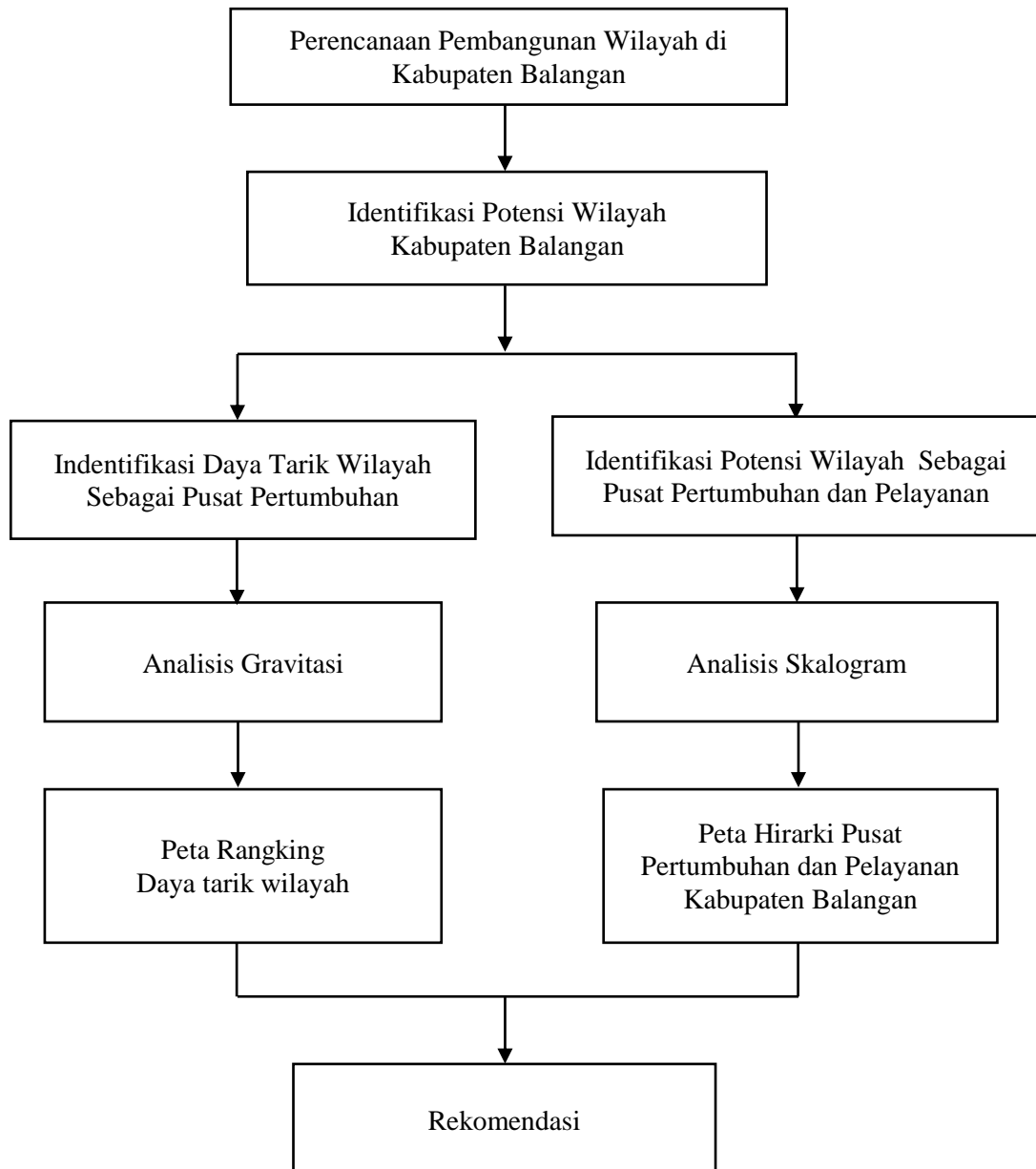
1.6. Kerangka Penelitian

Untuk menganalisis potensi wilayah Sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan digunakan metode analisis gravitasi dan analisis skalogram.

Dalam hal menentukan pusat pertumbuhan ekonomi yang optimal di Kabupaten Balangan, digunakan metode analisis model gravitasi dan analisis skalogram. Analisis model gravitasi digunakan terhadap data sekunder berupa jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan/subwilayah dalam Kabupaten Balangan, sedangkan analisis skalogram digunakan terhadap data sekunder berupa tingkat perekonomian wilayah tersebut dengan menggunakan variabel luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah pasar, jumlah bank, jumlah koperasi, produksi pertanian, produksi perkebunan, populasi ternak, dan produksi perikanan. Di sini, temuan hasil analisis model gravitasi akan dibandingkan dan hasil analisis skalogram, sehingga diketahui subwilayah/ kecamatan mana yang optimal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, karena memiliki daya tarik wilayah yang tinggi atau menjadi tujuan perpindahan penduduk dan pergerakan arus barang/jasa, disamping juga sekaligus memiliki potensi ekonomi yang tinggi dalam mengemban fungsi perekonomian suatu ibukota.

Adapun untuk menentukan pusat pelayanan masyarakat yang optimal, digunakan metode analisis skalogram terhadap data sekunder berupa sejumlah data potensi sumberdaya manusia meliputi; variabel jumlah guru, murid, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat, dukun bayi/dukun kampung, potensi sumberdaya buatan meliputi; variabel sekolah (fasilitas pendidikan), fasilitas kesehatan, tempat ibadah, fasilitas air bersih (kapasitas PDAM terpasang), fasilitas energi/penerangan (daya listrik terpasang), dan fasilitas komunikasi (kantor pos dan telekomunikasi), antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Balangan.

Kemudian, dilakukan pendekatan analisis kualitatif. Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara berurutan dari tujuan satu dan dua, maka dilakukan proses sintesis terhadap interpretasi atas temuan hasil analisis dan pembahasan pada tujuan satu dan dua, sehingga akhirnya dapat memberikan jawaban permasalahan ketiga sebagai *objective* hasil penelitian ini. Kerangka pemikiran penelitian konseptual dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut.

Gambar 1.1. Kerangka Penelitian

Sumber: Penulis, 2015

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Penentuan Daerah Penelitian

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara *puposive* atau berdasarkan tujuan. Daerah yang dijadikan lokasi penelitian adalah Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, yang meliputi delapan kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Lampihung
2. Kecamatan Batu Mandi
3. Kecamatan Awayan
4. Kecamatan Tebing Tinggi
5. Kecamatan Paringin
6. Kecamatan Paringin Selatan
7. Kecamatan Juai
8. Kecamatan Halong

1.7.2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari suatu dokumentasi yang sudah ada atau sudah jadi yakni berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Balangan. Data-data sekunder yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Data jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Balangan tahun 2014
2. Data Luas Wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Balangan tahun 2014
3. Data sarana dan prasarana menurut kecamatan di Kabupaten Balangan tahun 2014 yaitu sarana perkonimian antara lain; bank, koperasi, pasar dan fasilitas pelayanan antara lain; sekolahan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, PDAM terpasang, jaringan jalan, kantor pos dan fasilitas rekreasi.

1.7.3. Analisis Data

Untuk menganalisis strategi pengembangan wilayah Kabupaten Balangan, yakni menentukan lokasi kecamatan yang paling optimal sebagai pusat

pertumbuhan wilayah dan pusat pelayanan masyarakat, digunakan pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif.

1.7.3.1. Analisis Penentuan Lokasi Optimal Pusat Pertumbuhan

Dalam penelitian ini untuk menentukan posisi lokasi yang paling optimal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam kerangka perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Balangan digunakan pendekatan model gravitasi dan analisis skalogram.

Salah satu alat analisis yang kemungkinan kita menjelaskan keberadaan kegiatan pada lokasi tersebut adalah model gravitasi. Menurut Tarigan (2010:105) model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu besarnya potensi yang berada pada suatu lokasi. Lebih lanjut daya tarik ini kemudian mendorong berbagai kegiatan lain untuk berlokasi di dekat kegiatan yang telah ada terlebih dahulu. Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dalam perencanaan wilayah, model ini sering di jadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar. Rumus gravitasi secara umum adalah sebagai berikut :

$$T_{ij} = k \frac{P_i P_j}{d_{ij}^b}$$

Keterangan :

- T_{ij} = Daya tarik atau banyaknya trip dari sub-wilayah i ke sub-wilayah j,
- P_i = Penduduk subwilayah i ,
- P_j = Penduduk subwilayah j,
- d_{ij} = Jarak antara subwilayah i dengan subwilayah j,
- b = Pangkat dari d_{ij} menggambarkan cepatnya jumlah trip menurun seiring dengan pertambahan jarak. Nilai b dapat dihitung tetapi bila tidak maka sering digunakan $b = 2$,
- k = Sebuah bilangan konstanta berdasarkan pengalaman, juga dapat dihitung seperti b (Tarigan, 2010:105).

1.7.3.2. Analisis Penentuan Lokasi Optimal Pusat Pelayanan Masyarakat

Untuk menentukan posisi lokasi yang paling optimal sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam kerangka perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Balangan digunakan pendekatan analisis skalogram. Analisis ini digunakan untuk menyusun struktur dan organisasi tata ruang suatu wilayah. Dengan metode analisis skalogram dapat ditentukan hirarki atau ranking/tingkatan kota kecil dan kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan berdasarkan fasilitas/sarana pelayanan yang tersedia, disamping berdasarkan kapasitas sumberdaya manusia (fungsi administrasi) dan analisis aksesibilitas (jarak antar ibu kota kecamatan). Ranking (tingkatan) kota kecil ditentukan berdasarkan jumlah jenis dan jumlah unit fasilitas sosial dan fasilitas lain yang dimilikinya. Dari gabungan ketiga analisis ini, akan dapat diketahui distribusi wilayah-wilayah kecamatan yang dapat dikembangkan menjadi pusat pelayanan utama (PPU), pusat pelayanan menengah (PPM), dan pusat pelayanan kecil (PPK) untuk Kabupaten Balangan.

Cara menyusun dan menetapkan ranking atau tingkatan kota-kota tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wilayah kecamatan disusun urutannya berdasarkan jumlah penduduk.
2. Kemudian kecamatan tersebut disusun urutannya berdasarkan atas jumlah Jenis fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia.
3. Masing-masing jenis sarana dan prasarana tersebut disusun urutannya pada semua wilayah yang memiliki jenis fasilitas tertentu.
4. Ranking atau peringkat fasilitas sarana dan prasarana disusun urutannya berdasarkan atas jumlah unit fasilitas sarana dan prasarana tersebut.
5. Ranking kota kecamatan/wilayah ditentukan berdasarkan jumlah jenis dan jumlah unit sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing unit.

Dalam studi ini tingkatan tiap-tiap objek penelitian terhadap variabel-variabelnya dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat tinggi, tingkat sedang, dan tingkat rendah. Adapun untuk menghitung tingkatan atau hierarki digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Interval Nilai} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{3}$$

Adapun matriks skalogram dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4. Matriks Skalogram

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jenis Sarana dan Prasarana				Hierarki
			SD	RS	
1							
2							
....							
dst							
Frekuensi (F)							

Diolah Dari Berbagai Sumber

1.8. Batasan Operasional

- Wilayah adalah suatu permukaan yang luas, yang dihuni manusia yang melakukan interaksi kegiatan dengan sumberdaya alam, sumberdaya modal, sumberdaya teknologi, sumberdaya kelembagaan, dan sumberdaya pembangunan lainnya, untuk mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat (Adisasmita, 2011: 59)
- Potensi wilayah adalah segala sesuatu yang dimiliki suatu wilayah yang memungkinkan untuk dikembangkan sehingga mampu memberi nilai tambah pada daerah tersebut
- Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan.
- Skalogram adalah untuk mengidentifikasi atau mengetahui pusat pelayanan wilayah berdasarkan fasilitas yang dimiliki, dengan demikian dapat ditentukan hierarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah.

- Gravitasi adalah salah satu model yang digunakan untuk menghitung interaksi antar kota
- Pengembangan Wilayah adalah merupakan suatu usaha-usaha tertentu untuk mengubah kondisi yang ada menjadi suatu kondisi lebih baik (Luthfi Muta'ali, 2011: 1)
- Pusat Pertumbuhan adalah suatu tempat merupakan suatu kutub pertumbuhan apabila di tempat tersebut terdapat industry pendorong (propulsive industry) yang berskala besar, mempunyai kemampuan menciptakan dorongan pertumbuhan yang kuat, dampak multiplier dan dampak polarisasi local yang sangat besar dan tingkat teknologi maju (Adisasmita, 2006: 163)